



DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SULAWESI
SELATAN

RENJA 2023



KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 126 s/d 129, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Awal R e n j a P e r a n g k a t D a e r a h

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menyusun rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 - 2023. Rencana Kerja Awal ini menyajikan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya (2022) yang berintikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat daerah pada tahun 2023 yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi-Nya.

Makassar, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan

H. AHMADI AKIL, SE.MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 1966123 199403 1 081

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 2

Daftar Isi..... 3

Bab I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Landasan Hukum..... 7

1.3 Maksud Tujuan..... 10

1.4 Sistematika Penulisan..... 10

Bab II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN LALU..... 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 28

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian..... 31

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 42

Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Kerja..... 50

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas..... 51

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 58

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat daerah..... 58

Bab V PENUTUP..... 69

5.1 Kesimpulan..... 69

5.2 Saran..... 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah, maka Dinas Perindustrian sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN LALU

Dinas perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Menindaklanjuti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 dengan menjabarkannya kedalam dokumen perencanaan OPD dalam bentuk dokumen Renstra (2019-2023) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuat setiap tahunnya yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan disektor perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu satu tahun. Maksud lain dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah untuk tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya sektor Industri yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Dalam mewujudkan Rencana kerja tersebut, telah direalisasikan dalam 4 Program yang diuraikan dalam 31 kegiatan pada Tahun 2022. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama bulan Januari-Desember 2022 dari target yang telah ditetapkan 100 % terealisasi sebesar 99,71 % adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

B A B III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kementerian Perindustrian adalah Meningkatkan **industri** yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta **industri** hijau. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan **industri** oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. Dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rencana strategis disusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan 2019 - 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 - 2023 di mana setiap tahunnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana. Rencana Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai kedepan dalam kurun waktu tertentu yang disusun dengan memperhatikan; RPJM Nasional, RPJPD Sulawesi Selatan 2008-2028, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan.

Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur. Untuk itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama RPJMD 2019-2023 adalah: “ **Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter**”.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat daerah

Program Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan . Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas , diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarka ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanannya. Pencapaian target kinerja program (Outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan namun juga oleh sumber sumber pendanaan lainnya seperti APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Adapun rencana Program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Instansi terkait lainnya. Untuk itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas

Program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022

1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 telah disusun sebagai pedoman utama penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk RKT Tahun 2022 karena pelaksanaan pembangunan sektor Perindustrian di Sulawesi Selatan merupakan suatu kesatuan rangkaian kegiatan selama periode tersebut dalam upaya pencapaian Visi **Sulawesi selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter**".

- Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi didalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama

RENJA | 2023



DINAS PERDAGANGAN PROV. SULSEL

Jl. Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala, Kec. Tamalate
Website : disdag.sulselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. atas segala Rahmat dan KaruniaNya kepada kita, Alhamdulillah Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk Tahun 2023

Penyusunan Renja Tahun 2023 mengacu kepada Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, melalui tahapan yang diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya menampung aspirasi dari pemerintah Kab/Kota, kemudian koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Perdagangan sebagai representasi Pemerintah Pusat.

Renja ini merupakan dokumen perencanaan satu tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan perdagangan, selain itu penyusunan Renja disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan serta instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan perdagangan.

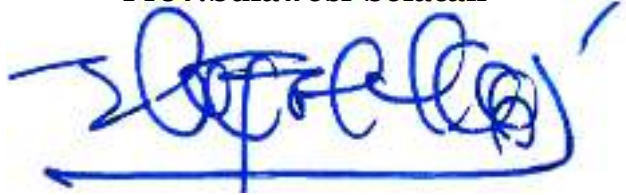
Renja yang disusun memuat gambaran umum sektor perdagangan, isu isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, program kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan daerah urusan perdagangan yang diharapkan dapat

berdampak pada Laju Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Atas Semua bantuan semua pihak kami ucapkan terimakasih dan, mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam dokumen ini.

Makassar, Juli 2022

**Kepala Dinas Perdagangan
Prov.Sulawesi Selatan**



Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19690714 199112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan.....	30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perdagangan.....	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.	43
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	48
BAB V P E N U T U P	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Dokumen Renja 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan membuat Renja yang

merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 yaitu tentang pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. **Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan Renja meliputi :**

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

i. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

ii. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

3. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2022 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1.3.1 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Perdagangan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

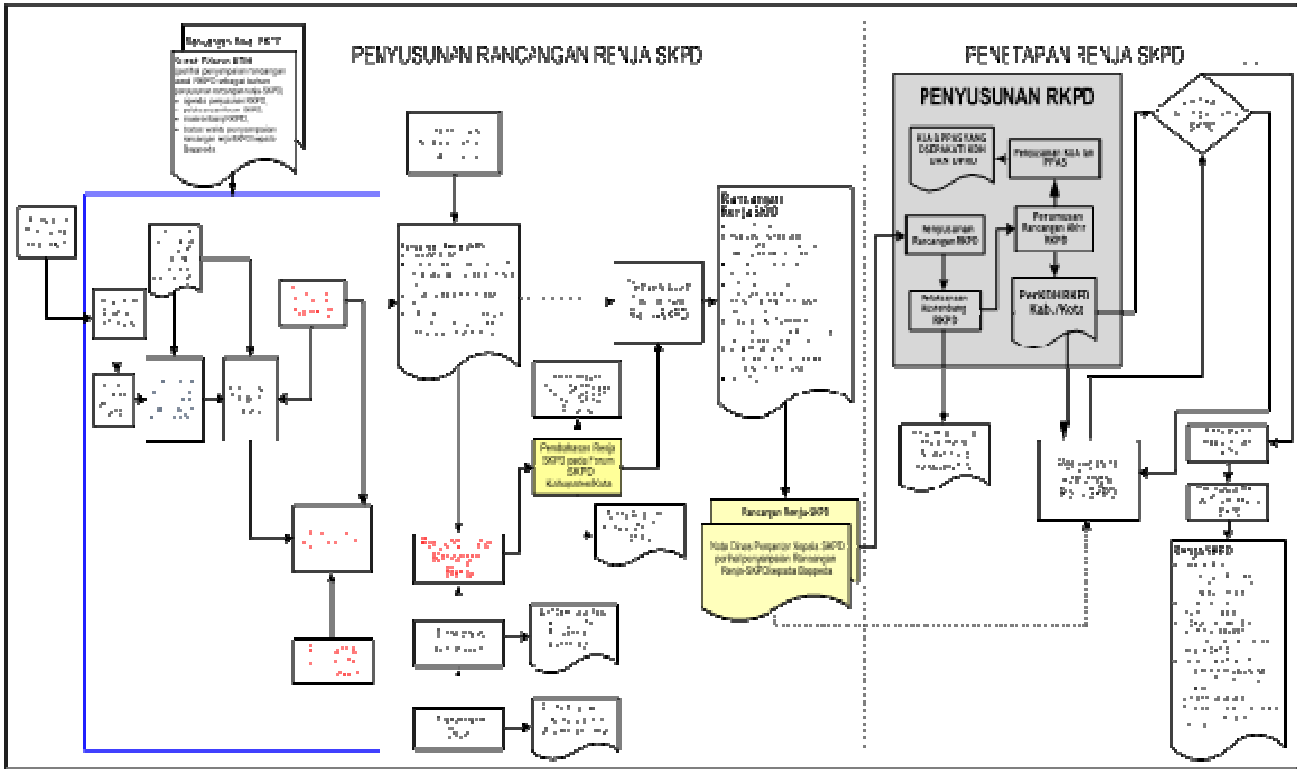
Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan Renja



1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012), Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Standarisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 80);
 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Logistik Perdagangan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 82);
 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2019 kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;

25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20... (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun .. Nomor ..)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja OPD

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tahun 2023 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perdagangan jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perdagangan dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;

Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Tahun 2023 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dalam jangka 1 tahun;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perdagangan;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perdagangan Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (N-1),

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2, tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1, tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan /atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Seperti yang disajikan pada Tabel T-C.29

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan

Seperti yang disajikan pada Tabel T-C.30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Disajikan pada table C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain;

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Disajikan pada table C.32

Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN,

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

- Pengembangan daerah terisolir,
 - Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

Bab V PENUTUP,

Berisi uraian penutup yang berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (N-2)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN

Tahun 2021 merupakan masa proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Evaluasi Renja PD tahun 2021 ini memuat kajian (*review*) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2021), mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Realisasi Renja Dinas Perdagangan Tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang disampaikan melalui aplikasi E-Monev terkait Evaluasi Pencapaian Target-target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Berdasarkan APBD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2380/XI/Tahun 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021, Dinas Perdagangan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp Rp. 16.963.914.524 untuk melaksanakan program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Ketidaksesuaian antara jumlah program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Perdagangan Tahun 2021 dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan karena keterbatasan kemampuan anggaran serta adanya pergeseran kode rekening kegiatan pada kode rekening kegiatan yang lebih tepat dan perubahan pada indikator kinerja. Hasil evaluasi Renja Dinas Perdagangan yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian program sebesar 100,00% dengan penyerapan

keuangan sebesar 92,95 % atau sebesar Rp 15.767.873.208 dari target anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp 16.963.914.524.

Adapun Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tertera pada tabel dibawah sebagai berikut:



NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA-PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
							6	7	8=(7/6)	9		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (tahun 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1		2	3		4	5							
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN											
3	30	BIDANG PERDAGANGAN											
		Dinas Perdagangan											
3	30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	
			Persentase Penerbitan SKA	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0	
3	30	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol SIUPMB bagi Distributor	Jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor	Data	15,0	0,0	5,0	1,0	20,0	5,0	6,0	40,0	
3	30	0 1	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan SIUPMB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUPMB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	rekomendasi	6,0	0,0	5,0	1,0	20,0	5,0	6,0	100,0	
3	30	0.00.0.00. 44.0000	Penerbitan Surat Keterangan Asal SKA Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir API	Dokumen	14.400,0	0,0	4.800,0	5.154,0	107,38	4.800,0	9.954,0	69,125	
3	30	0.00.0.00. 44.0000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Dokumen	14.400,0	0,0	4.800,0	5.154,0	107,38	4.800,0	9.954,0	69,125	
3	30	0.00.0.00. 44.0000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0	



	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Sarana	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	3,0	9,0	300,0
01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan/tersewakan	Sarana	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	3,0	9,0	300,0
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0
	Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali	Komoditi	66,0	22,0	22,0	22,0	22,0	100,0	22,0	66,0	100,0
01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan yang dilakukan	Kali	36,0	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	36,0	100,0
02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	Lokasi	14,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0	3,0	15,0	107,143
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Nilai total ekspor	\$ US	4.761.643.140,0	0,0	1.358.097.840,0	1.384.609.056,68	1.466.745.670,0	100,0	2.851.354.726,68	59,882	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	Lokasi	10,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	20,0
01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Lokasi Pameran dagang internasional/nasional yang diikuti	Lokasi	10,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	4,0	4,0	50,0
04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/pembinaan peningkatan citra produk ekspor	Orang	100,0	0,0	15,0	4,0	40,0	26,67	40,0	44,0	27,50
05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina	Pelaku Usaha	390,0	0,0	120,0	90,0	120,0	75,0	120,0	210,0	75,0



	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa/ gudang yang terawasi Rata-rata sertifikat uji mutu barang yang diterbitkan	%	100,0	0,0	100,0	24,01	24,01	100,0	124,01	100,0
		Rata-rata BPSK yg diberdayakan	BPSK	10,0	0,0	2,0	100,0	100,0	2,0	4,0	100,0
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah KabupatenKota	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	Aduan	90,0	0,0	60,0	71,0	118,0	30,0	101,0	0,0
01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen	peserta	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
		Jumlah BPSK yang terfasilitasi	BPSK	6,0	2,0	2,0	2,0	100,0	2,0	6,0	100,0
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah KabupatenKota	Rata2 Sertifikat yang diterbitkan	Sertifikat	5.529,0	2.062,0	1.674,0	1.931,0	115,35	1.759,0	5.752,0	92,55
02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Serti-kat hasil uji komoditi yang diterbitkan	sertifika t	6.300,0	3.128,0	2.000,0	2.702,0	103,60	2.050,0	7.880,0	109,85
03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan	sertifika t	0,0	24,0	24,0	24,0	100,0	27,0	75,0	81,48
04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat kalibrasi alat yang diterbitkan	sertifika t	10.200,0	3.035,0	3.000,0	3.068,0	102,26	3.200,0	9.303,0	81,62
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar danatau Jasa di Seluruh Daerah KabupatenKota	Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan	Pelaku Usaha	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
		Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	Unit	90.000,0	0,0	85.000,0	20.410,0	24,01	30.000,0	50.410,0	0,0
01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar danatau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi	Pelaku Usaha	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
		Jumlah Barang Beredar dan Jasa Yang Diawasi	Unit	90.000,0	90.000,0	85.000,0	20.410,0	24,01	30.000,0	140.410,0	0,0
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	%	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	50,0
		Termantaatkannya sistem dan jaringan informasi perdagangan yang dibuat	Database	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	orang	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	62,50
0 1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	96,17
		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0
0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Dokume n	0,0	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0	3,0	9,0	100,0
0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	Dokume n	0,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	1,0	3,0	100,0
0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	Dokume n	0,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	1,0	3,0	100,0
0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Dokume n	0,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	1,0	3,0	100,0
0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	Dokume n	0,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	1,0	3,0	100,0
0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (laplakit, LPPD, LKPJ), Laporan tahunan, Laporan kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIAREK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun	Dokume n	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	36,0	100,0



	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah TPP ASN yang terbayar	Orang/Bulan	76,0	76,0	76,0	100,0	100,0	76,0	228,0	100,0
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Orang/Bulan	76,0	76,0	76,0	100,0	100,0	76,0	228,0	100,0
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun	Laporan	0,0	3,0	3,0	100,0	100,0	3,0	9,0	100,0
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Laporan	0,0	2,0	2,0	100,0	100,0	2,0	6,0	100,0
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0,0	1,0	1,0	100,0	100,0	1,0	3,0	100,0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	Unit	0,0	0,0	18,0	100,0	100,0	18,0	36,0	100,0
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Jenis	0,0	65,0	65,0	100,0	100,0	65,0	195,0	100,0
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	Kali	0,0	28,0	28,0	100,0	100,0	28,0	84,0	100,0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	Bulan	36,0	12,0	12,0	100,0	100,0	12,0	36,0	100,0
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang terbayar	Bulan	36,0	12,0	12,0	100,0	100,0	12,0	36,0	100,0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	100,0
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Unit	6,0	2,0	2,0	100,0	100,0	0,0	4,0	0,0
09	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang terpelihara	gedung	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0
11	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Sarana	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0



Pada Urusan Perdagangan terdapat 7 program, 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.595.151.096, telah terealisasi sebesar Rp. 12.470.413.818 atau 91,73%, dan fisik juga telah mencapai 95,22%. Sasaran program Tersedianya Dukungan Operasional Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah. Dari program ini dihasilkan Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP, Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik, Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah. Untuk Target kinerja tahun 2021 adalah 100 %, dengan realisasi telah mencapai 100 %

Yang Terdiri dari 5 Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 159.006.700, telah terealisasi sebesar Rp. 158.455.700 atau 99,65 %, dan fisik 100 %

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.855.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 29.855.000
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.517.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 14.082.000 (97,00 %) dan fisik (100 %)
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.331.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 23.331.000 (100 %) dan fisik (100 %)
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.990.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 14.980.000 (99,93 %) dan fisik (100 %)
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.258.700, telah terealisasi Sebesar Rp. 26.258.700 (100 %) dan fisik (100 %)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.055.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 49.949.000 (99,79 %) dan fisik (100%)

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.279.688.194, telah terealisasi sebesar Rp. 9.070.381.535 (97,74%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.245.705.194, telah terealisasi sebesar Rp. 9.037.466.527 (97,75%) dan fisik (100%)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.135.000, telah terealisasi sebesar Rp. 15.263.000 (94,60%) dan fisik (100%)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.618.000, telah terealisasi sebesar Rp. 14.452.008 (98,86%) dan fisik (100%)
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran jumlah anggaran sebesar Rp 3.230.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.200.000 (99,07%) dan fisik (100%)

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.347.745.800, telah terealisasi sebesar Rp. 1.269.244.946 (94,18%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 703.553.000, telah terealisasi sebesar Rp. 682.980.000 (97,08%) dan fisik (100%)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 351.041.800, telah terealisasi sebesar Rp. 294.282.958 (83,83%) dan fisik (100%)

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 293.151.000, telah terealisasi sebesar Rp. 291.981.988 (99,60%) dan fisik (100%)

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.900.185.902 telah terealisasi sebesar Rp. 1.754.103.864 (92,31%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 580.134.342 telah terealisasi sebesar Rp. 434.052.304 (74,82%) dan fisik (100%)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.320.051.560 telah terealisasi sebesar Rp. 1.320.051.560 (100%) dan fisik (100%)

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 908.524.500 telah terealisasi sebesar Rp. 218.227.773 (24,02%) dan fisik (28,46%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 202.699.500 telah terealisasi sebesar Rp. 181.075.273 (89,33%) dan fisik (100%)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran sebesar Rp. 650.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 0
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, jumlah anggaran sebesar Rp. 55.825.000 telah terealisasi sebesar Rp. 37.152.500 (66,55%) dan fisik (100%)

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 95.405.000, telah terealisasi sebesar Rp. 95.260.000 atau 99,85%, dan fisik juga telah mencapai 100%. Sasaran program Terasfasilitasinya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Dari

program ini dihasilkan Jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan, dan Jumlah pengurusan SKA. Untuk target kinerjanya yaitu 5 data rekomendasi SIUP/MB dan 4800 data rekomendasi SKA yang dikeluarkan, tingkat capaian kinerja sampai triwulan IV meliputi 0 Data rekomendasi SIUP/MB dan 5465 rekomendasi SKA yang telah dikeluarkan.

Yang Terdiri dari 2 Kegiatan :

1) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor

- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.405.000 telah terealisasi sebesar Rp. 15.260.000 (99,06%), dan fisik (100 %)

Sub Kegiatan :

- Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jumlah anggaran sebesar Rp. 15.405.000 telah terealisasi sebesar Rp. 15.260.000 (99,06%), dan fisik (100 %)

2) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA, jumlah anggaran sebesar Rp. 80.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 80.000.000 (100%), dan fisik 100 %

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 603.556.036, telah terealisasi sebesar Rp. 588.241.856 atau 97,46%, dan fisik juga telah mencapai 100%. Sasaran program Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan. Dari program ini dihasilkan Jumlah sarana dan prasarana Pusat Distribusi Regional yang dimanfaatkan, dengan target kinerja 3 sarana. Adapun capaian kinerja hingga Triwulan IV mencapai 3 sarana.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1) Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 603.556.036, telah terealisasi sebesar Rp. 588.241.856 (97,46%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, Anggaran sebesar Rp. 603.556.036, telah terealisasi sebesar Rp. 588.241.856 (97,46%) dan fisik (100%)

- 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 622.952.500, telah terealisasi sebesar Rp. 619.414.000 atau 99,43%, dan fisik telah mencapai 100%. sasaran programnya yaitu Terpantaunya Pasokan dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Penting. Dari program ini dihasilkan Rata-rata harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. dengan target kinerja 22 harga bapak. Adapun capaian kinerja sampai triwulan IV mencapai 22 harga bapak yang terpantau.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

- 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.** Dengan Jumlah Anggaran Rp. 622.952.500,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 619.414.000 (99,43%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota, Anggaran sebesar Rp 0
- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Anggaran sebesar, Rp. 622.952.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 619.414.000 (99,43%) Dan Fisik (100%)

1. Program Pengembangan Ekspor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 227.948.900, telah terealisasi sebesar Rp. 218.634.700 atau 95,91%, dan fisik telah mencapai 100%. Sasaran programnya adalah Meningkatnya Nilai Ekspor. Dari Program ini dihasilkan Jumlah Nilai Total Ekspor, Jumlah Pelaku usaha ekspor yang terlatih, Jumlah penyelenggaraan pameran yang terlaksana, Jumlah MOU yang dikerjasamakan, dengan target kinerja 1.466.745.670 US\$. Capaian kinerja hingga Triwulan IV mencapai 1.501.625.498 US\$.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 227.948.900, telah terealisasi sebesar Rp. 218.634.700 (94,91%) dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pameran Dagang Internasional/Nasional, Anggaran sebesar Rp. 44.774.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 44.519.800 (99,43%) dan Fisik (100%)
- Peningkatan Citra Produk Ekspor, Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 99.000.000 (99,00%) dan Fisik (100%)
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, Anggaran sebesar Rp. 83.174.900,- telah terealisasi sebesar Rp 75.114.900 (90,31%) dan Fisik (100%)

6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.781.004.392, telah terealisasi sebesar Rp. 1.739.447.234 atau 97,67%, dan fisik telah mencapai 100%. Sasaran programnya adalah Terjaminnya Kualitas Produk dan Terlindunginya Konsumen. Dari program ini dihasilkan Persentase barang beredar dan jasa/ gudang yang terawasi, Rata-rata sertifikat uji mutu barang yang diterbitkan, Rata-rata BPSK yg diberdayakan, dengan target kinerja 100 %, rata-rata 1759 sertifikat dan 2 BPSK. Adapun capaian kinerjanya 40,85%, 1628 sertifikat dan 2 BPSK.

Yang Terdiri Dari 3 Kegiatan :

1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 204.660.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 174.770.000 (85,40%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, Anggaran sebesar Rp. 204.660.000 telah terealisasi sebesar Rp. 174.770.000 (85,40%) Dan Fisik (100%)

2) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 1.444.264.392,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 1.433.032.234 (99,22%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian, Anggaran Rp. 758.204.372,- realisasi sebesar Rp. 756.807.531 (99,82%) dan fisik (100%)
 - Pengembangan Layanan Sertifikasi, Anggaran 485.492.020,- realisasi sebesar Rp. 476.124.703 (98,07%) dan fisik (100%)
 - Pengembangan Layanan Kalibrasi, Anggaran 200.568.000, realisasi sebesar 200.100.000 (99,77%) dan fisik (100%)

3) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 132.080.000 Telah Terealisasi Sebesar Rp. 131.645.000 (99,67%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, dengan jumlah anggaran Rp. 132.080.000 Telah Terealisasi Sebesar Rp. 131.645.000 (99,67%) Dan Fisik (100%)

- 7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.896.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 36.461.600 atau 96,21%, dan fisik telah mencapai 100%., sasaran programnya adalah Terfasilitasinya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. dari program ini dihasilkan: % Pelaku usaha yang

terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri, Termanfaatkannya sistem dan jaringan informasi perdagangan yang dibuat.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri,**
Dengan Jumlah Anggaran Rp. 37.896.600,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 36.461.600,- Dan Fisik (100%), Untuk Terkendalinya Harga Bahan Pokok Menjelang HKBN.

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah Anggaran Rp. 37.896.600,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 36.461.600,- Dan Fisik 100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

Upaya meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dilaksanakan sinergis dengan terwujudnya kemitraan pemerintah, dunia usaha, koperasi dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator yang ditetapkan belum seluruhnya dapat terukur baik disebabkan belum adanya program/kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi indikator tersebut maupun beberapa faktor operasional teknis yang menjadi kendala.

Adapun untuk penjelasan matriks kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Prov. Sulsel dapat kita simak pada tabel dibawah sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023		2022	2023	
1	Nilai Ekspor	Sertifikasi & SKA	Ekspor Bersih Perdagangan	1.466.745.670 USD	1.584.085.320 USD	1.710.812.150 USD	1.501.625.498 USD	1.584.085.320 USD	1.710.812.150 USD	

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat diketahui jikalau penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Ekspor Bersih Perdagangan adalah diantaranya :

- Berkembangnya infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.
- Makin banyaknya/beragamnya komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor
- Terlaksananya Direct Call Makassar – Eropa – Amerika, Direct call Makassar – Asia dan Direct flight Makassar – Singapura serta Makassar – Hongkong, yang berpotensi dalam peningkatan ekspor karena adanya efisiensi logistic perdagangan dari segi waktu Maupun biaya dengan meniadakan port of transit.
- Dalam rangka pengembangan ekspor Sulawesi Selatan kedepannya telah dibentuk tim antara Pemprov SulSel, Pemda Kab. Jeneponto dan Kab. Sidenreng Rappang serta PT. PELNI IV (Persero) akan dibangun Pusat Konsolidasi Cargo (DryPort) yang berlokasi di Kab. Jeneponto dan Kab. Sidenreng Rappang, yang bertujuan untuk menciptakan jalur logistik yang lebih efisien.

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan pula bahwa peningkatan sektor perdagangan diupayakan pula melalui peningkatan pemasaran produk daerah meliputi meningkatkan nilai ekspor bersih daerah. Seluruh kinerja pelayanan tersebut didukung dengan kinerja

administrasi dan urusan rutin yang berjalan dengan baik. Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, diperkirakan akan mencapai target 100 persen sesuai dengan rencana. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur diperkirakan akan mencapai target 90 persen sesuai rencana, demikian pula dengan presentase PNS/aparatur sipil taat aturan sebesar 100 persen. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel dan persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD diperkirakan akan mencapai target 100 persen pula sesuai dengan rencana. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah antara lain melalui :

- a. Peningkatan kinerja dan aparat pelaksana.
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi.
- d. Pemanfaatan aset-aset yang dimiliki secara efektif dan efisien.
- e. Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait maupun pihak ketiga.

Pendapatan hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan retribusi dari tahun ke tahun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan dapat memperkuat posisi keuangan daerah.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN

Peran dan posisi Dinas Perdagangan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat

dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan perdagangan merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi PD. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta perbatasan ekonomi global pada umumnya. Kondisi lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang perdagangan kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.

Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun peluang dari berbagai *stakeholder* yang lain. Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk

kerajinan. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan pendampingan usaha diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar. Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Rendahnya daya saing produk Provinsi Sulawesi Selatan yang semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor memang masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Pengembangan produk unggulan kecamatan dan daerah diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif bagi pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan barang/jasa yang beredar, masih banyak produk yang belum memenuhi standar kualitas dan keamanan produk beredar di pasaran. Selain itu, untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam mengelola 723 pasar Pemerintah Daerah telah dibagi dalam 2 wilayah yang disebut kemantren pasar dan masing-masing kemantren membawahi beberapa pasar. Prasarana dan sarana pasar yang representatif perlu ditambah dan disempurnakan, demikian pula sumber daya manusia maupun manajemen yang perlu ditingkatkan.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 antara lain:

1. Pengembangan Ekonomi Lokal Dengan Optimalisasi Segenap Potensi;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Pelaku Usaha Perdagangan;
3. Ekspor Dengan Optimalisasi Akses Pasar;

4. Peningkatan Penggunaan Produk Daerah Untuk Mendorong Pengembangan Industri Lokal;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dengan Mendorong Peningkatan Kualitas Dan Perluasan Pasar;
6. Peningkatan Perlindungan Konsumen;
7. Penyediaan Akses Pembiayaan Dan Penjaminan Bagi Usaha Perdagangan;
8. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Perdagangan;
9. Peningkatan Koordinasi Dan Sinergisitas Program/Kegiatan Dan Pendanaan Dengan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat; Dan
10. Peningkatan Inovasi Daerah Serta Integrasi Pembinaan Perdagangan;
11. Optimalisasi Pendapatan Dengan Upaya Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal RKPD melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten yang didasarkan pada analisis kebutuhan setiap organisasi Perangkat Daerah. Mendasari pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan serta adanya penyederhanaan beberapa program dan kegiatan. Rancangan awal

RKPD dibuat melalui perencanaan dari bawah dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain SDM, dana, kebutuhan masyarakat, dan faktor lain yang terkait. Oleh sebab itu perencanaan dibuat berdasarkan skala prioritas, sehingga apa yang direncanakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil analisis kebutuhan. Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dari rancangan awal RKPD kemudian disempurnakan baik dari besaran dananya, penyederhanaan program dan kegiatan serta adanya kegiatan tambahan yang memang harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap berbagai masukan pada saat Musrenbang dan Forum gabungan Perangkat Daerah serta penyesuaian rekening kegiatan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. **Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Dinas Perdagangan merencanakan untuk melaksanakan 7 program yang dijabarkan dalam 22 kegiatan, dan 52 Sub Kegiatan yaitu:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi 7 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan;
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan meliputi 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting meliputi 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan;
5. Program Pengembangan Ekspor meliputi 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan;
6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen meliputi 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan;
7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri meliputi 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;

Dinamika dan analisis yang dilakukan menyebabkan beberapa perubahan pula dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja. Beberapa rasionalisasi program/kegiatan dilakukan, kegiatan yang terangkum dalam program peningkatan kualitas pelayanan publik dimasukkan dalam satu kegiatan dari sebelumnya dua kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perdagangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 serta hasil analisis kebutuhan secara rinci terlihat pada Tabel berikut :



Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2023 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan										
RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Indikatif	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ an/ Subkegiatan	Kebutuhan Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1. % Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 2. % ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik 3. % Pemenuhan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	17.410.522.407,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1. % Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 2. % ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik 3. % Pemenuhan Temuan Berdasarkan LHP	100 %	17.410.522.407,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	349.404.469,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	349.404.469,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	88.657.469	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	88.657.469
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Pokok yang tersusun	1 Dokumen	16.517.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Pokok yang tersusun	1 Dokumen	16.517.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	1 Dokumen	13.652.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	1 Dokumen	13.652.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1 Dokumen	20.990.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1 Dokumen	20.990.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1 Dokumen	15.165.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1 Dokumen	15.165.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (lapakip, LPPD, LKPI, Laporan tahunan, Laporan Kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIARFAK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun	12 Dokumen	194.423.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (lapakip, LPPD, LKPI, Laporan tahunan, Laporan Kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIARFAK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun	12 Dokumen	194.423.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	11.817.056.317,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	11.817.056.317,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 2. Jumlah TPP ASN yang terbayar	85 Orang	11.758.393.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 2. Jumlah TPP ASN yang terbayar	85 Orang	11.758.393.289
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun	3 Laporan	16.840.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun	3 Laporan	16.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	34.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	34.625.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan	1 Dokumen	7.198.028	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan	1 Dokumen	7.198.028
	Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah	100 %	75.000.000	Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah	100 %	75.000.000
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pegawai		Jumlah Pakelan Dinas Lapangan dan Pakelan Status Har-Hari tertentu yang diadakan	280 Pasang	40.000.000	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pegawai		Jumlah Pakelan Dinas Lapangan dan Pakelan Status Har-Hari tertentu yang diadakan	280 Pasang	40.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	2 orang	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	2 orang	20.000.000
			Jumlah peserta sosialisasi	25 orang	15.000.000			Jumlah peserta sosialisasi	25 orang	15.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	1.502.798.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	1.502.798.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Unit	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Unit	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	20 Unit	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	20 Unit	300.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	70 Jenis ATK	300.360.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	70 Jenis ATK	300.360.000
	Pasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	200 orang	100.000.000	Pasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	200 orang	100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Berkepentingan		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	28 kali	792.438.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Berkepentingan		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	28 kali	792.438.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	750.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	750.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	400.000.000
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	20 Unit	200.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	20 Unit	200.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Item	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Item	100.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Item	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Item	50.000.000

	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	100 %	2.538.769.965	Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	100 %	2.538.769.965
	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik	12 Bulan	646.939.997	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik	12 Bulan	646.939.997
	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	1 tahun	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	1 tahun	10.000.000
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	1 tahun	1.881.829.968	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	1 tahun	1.881.829.968
	% Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	377.493.656	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	377.493.656
	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara	20 Unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara	20 Unit	70.000.000
	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	2 Item	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	2 Item	0
	Jumlah unit gedung yang terpelihara	1 gedung	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung yang terpelihara	1 gedung	190.000.000
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	10 sarana	107.493.656	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	10 sarana	107.493.656
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	10 sarana	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	10 sarana	10.000.000
	1. % Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan 2. % Penerbitan SKA	100 %	204.932.500	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		1. % Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan 2. % Penerbitan SKA	100 %	204.932.500
	Jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor	5 data	76.377.500	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Rekomendasi Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor	5 data	76.377.500
	Jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	5 Rekomendasi	76.377.500	Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	5 Rekomendasi	76.377.500
	Jumlah pengawasan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Obat Beracun, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 kali	15.000.000	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Obat Beracun		Jumlah pengawasan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Obat Beracun, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 kali	15.000.000
	Jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	3 kali	15.000.000	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Obat Beracun		Jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	3 kali	15.000.000
	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah	4800 Dokumen	113.555.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	4800 Dokumen	113.555.000
	Jumlah permohonan Penerbitan SKA	4800 Dokumen	113.555.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah permohonan Penerbitan SKA	4800 Dokumen	113.555.000
	% ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	348.980.536	PROGRAM PINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		% ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	348.980.536
	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	3 Sarana	348.980.536	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas		Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	3 Sarana	348.980.536
	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan/tersewakan	3 Sarana	338.980.536	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan/tersewakan	3 Sarana	338.980.536
	Jumlah pembinaan dan pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	10 kali	10.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah pembinaan dan pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	10 kali	10.000.000
	% ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	1.230.222.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		% ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	1.230.222.000
	Jumlah peserta rapat koordinasi HBKN	65 Peserta	50.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah peserta rapat koordinasi HBKN	65 Peserta	50.000.000
	Jumlah peserta rapat koordinasi HBKN	66 Peserta	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah peserta rapat koordinasi HBKN	66 Peserta	50.000.000
	Jumlah komoditi dengan harga yang terkendali	22 komoditi	1.165.222.000	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dan Usaha Perdagangan		Jumlah komoditi dengan harga yang terkendali	22 komoditi	1.165.222.000
	Jumlah pemantauan yang dilakukan	240 kali	89.237.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah pemantauan yang dilakukan	240 kali	89.237.000
	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	5 Lokasi	1.075.985.000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Damainya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	5 Lokasi	1.075.985.000

	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kali	15.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kali	15.000.000
	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	158408532 \$ US	1.023.875.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	158408532 \$ US	1.023.875.000
	Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	5 Lokasi	1.023.875.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	5 Lokasi	1.023.875.000
	Jumlah Lokasi Pameran dagang Internasional/nasional yang diikuti	5 Lokasi	500.000.000	Pameran Dagang Internasional/Nasional		Jumlah Lokasi Pameran dagang Internasional/nasional yang diikuti	5 Lokasi	500.000.000
	Jumlah Pelaksanaan Pameran	5 Lokasi	100.000.000	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaksanaan Pameran	5 Lokasi	100.000.000
	Jumlah MOU Produk Perdagangan yang Dihasilkan	3 MOU	50.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah MOU Produk Perdagangan yang Dihasilkan	3 MOU	50.000.000
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/pembinaan peningkatan citra produk ekspor	40 Orang	150.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/pembinaan peningkatan citra produk ekspor	40 Orang	150.000.000
	Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina	130 eksportir	223.875.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina	130 eksportir	223.875.000
	% Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen	100 %	1.639.690.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		% Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen	100 %	1.639.690.000
	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	30 Aduan	340.600.000	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	30 Aduan	340.600.000
	1.Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen	100 peserta	340.600.000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		1.Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen	100 peserta	340.600.000
	2. Jumlah BPSK yang terfasilitasi	2 BPSK				2. Jumlah BPSK yang terfasilitasi	2 BPSK	
	Rata2 Sertifikat yang diterbitkan	1843 Sertifikat	1.200.000.000	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Rata2 Sertifikat yang diterbitkan	1843 Sertifikat	1.200.000.000
	Jumlah Sertifikat hasil uji komoditi yang diterbitkan	2100 Sertifikat	450.000.000	Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Sertifikat hasil uji komoditi yang diterbitkan	2100 Sertifikat	450.000.000
	Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan	30 Sertifikat	500.000.000	Pengembangan Layanan Sertifikasi		Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan	30 Sertifikat	500.000.000
	Jumlah Sertifikat Kalibrasi alat yang diterbitkan	3400 Sertifikat	250.000.000	Pengembangan Layanan Kalibrasi		Jumlah Sertifikat kalibrasi alat yang diterbitkan	3400 Sertifikat	250.000.000
	1.Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	1. 30000 unit	99.090.000	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		1.Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	1. 30000 unit	99.090.000
	2. Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan	2. 50 Pelaku Usaha				2. Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan	2. 50 Pelaku Usaha	
	1.Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi	1. 30000 unit	200.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketertuan Perlindungan Konsumen		1.Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi	1. 30000 unit	200.000.000
	2.Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi	2. 50 Pelaku Usaha				2.Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi	2. 50 Pelaku Usaha	
	% Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100 %	119.933.900	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		% Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100 %	119.933.900
	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	100 Orang	99.933.900	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	100 Orang	99.933.900
	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	100 Orang	99.933.900	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	100 Orang	99.933.900
	Jumlah data Informasi Perdagangan yang tersedia	5 Data	20.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah data Informasi Perdagangan yang tersedia	5 Data	20.000.000
	Jumlah database sistem dan jaringan informasi perdagangan yang dibuat	5 Database	20.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah database sistem dan jaringan informasi perdagangan yang dibuat	5 Database	20.000.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Renja Dinas Perdagangan disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak. Sebagaimana telah tersebut pada uraian sebelumnya usulan dari masyarakat pada saat Forum Gabungan Perangkat Daerah, terkait dengan rehabilitasi pasar, beberapa usulan dapat terakomodir dikarenakan usulan tersebut memang benar-benar urgen dan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan ada usulan yang tidak dapat diakomodir dikarenakan berbagai hal antara lain keterbatasan penyediaan dana dan faktor geografis. Sedangkan masukan dari Tim Bappeda maupun dinas/instansi terkait adalah adanya sinkronisasi program kegiatan bahwasannya 1 program (kecuali Program rutin) hanya boleh dilaksanakan oleh satu organisasi Perangkat Daerah, agar tidak terjadi duplikasi dan mudah dalam menghitung capaian sasaran program kegiatan. Pada forum musyawarah ini terdapat 22 usulan kegiatan namun meskipun demikian ada 2 kegiatan ini belum dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Dinas Perdagangan tahun 2021 hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Perdagangan		

	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan		
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Sinjai	Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina	1 paket	Bimbingan teknis dalam rangka membina Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kab/Kota se Sulsel guna berorientasi ekspor (Pokir Partai Gerindra => Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd)
2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		% Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri		
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Makassar	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	200 orang (1 kali)	Fasilitasi Pelaku Usaha dalam rangka mempromosikan penggunaan Produknya di toko2 retail besar (usulan Pokir Partai Demokrat atas Nama Haidar Majid, S.Sos)
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Rata - Rata Barang beredar yang diawasi, tertib niaga dan pengaduan konsumen		
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani		
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kab. Maros	1.Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen 2. Jumlah BPSK yang terfasilitasi	1 paket	Edukasi Perlindungan Konsumen di Pasara tradisional/ Pasar modern/Mall diKabupaten/Kota (usulan Pokir dari PAN atas Nama Ir. Irfan. AB)



BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu:

“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Dengan 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kementerian perdagangan mendukung Prioritas Nasional ke 1 yaitu **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Kementerian Perdagangan merumuskan 14 (empat belas) tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);



8. Optimalisasi/ penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan Nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029.

Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Memperhatikan arahan tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu.

**“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Yang Di Dukung
Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”**

Dengan prioritas pembangunan tahun 2023, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Transformasi Perlindungan Sosial

5. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelolah Serta Pelayanan Publik

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menentukan kebijakan yang selaras antara lain 1) memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, 2) peningkatan produk ekspor, 3) meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi. Perkembangan kegiatan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dicerminkan dengan PDRB menurut harga konstan maupun harga berlaku. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi *Renaissance* Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. Adapun peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dilakukan melalui pembangunan secara terencana untuk menyempurnakan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2023 sebagaimana telah disajikan dalam rancangan RKPD tahun 2023. Selanjutnya rumusan rumusan tujuan dan sasaran tersebut telah disempurnakan dan disajikan dalam Rencana Kerja.

Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
					2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	-10
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	- % ASN Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100 %	100 %
				- Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100 %
				- Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	a	a	a
				- % Temuan Materiil	100 %	100 %	100 %
2	Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa	Neraca Perdagangan	Meningkatnya kinerja ekspor non migas	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	146674567 \$ US	158408532 \$ US	171081215 \$ US
3	Peningkatan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	% Pertumbuhan PDRB sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda motor	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%
			Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	- % Penanganan pengaduan konsumen	100%	100%	100%
				- % Produk yang sesuai dengan Standar SNI	100%	100%	100%



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dari Rancangan awal Renja Dinas Perdagangan terdapat penambahan beberapa kegiatan sebagai langkah tindak lanjut terhadap masukan dari Tim Kabupaten pada saat Musrenbang dan Forum Gabungan Perangkat Daerah. Usulan yang bersifat bersifat urgen diupayakan untuk diakomodir dalam RKPD. Penyesuaian juga dilakukan bersamaan dengan perubahan kelembagaan dan dinamika situasi kondisi lingkungan yang terjadi. Keseluruhannya Rencana Kerja ini terdiri atas 6 program, 19 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 21.771.000.754, (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Adapun program/kegiatan berlokasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.44.0000 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.44.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Uraian Bidang/ Uraian/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
3 30 06 1.02 04	Pengembangan Layanan Kalitros		Jumlah Sertifikat Kalitros yang Diterbitkan				0 Sertifikat		200.000.000	PENDAPATAN ASU DMEPAH (PAD)	
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								600.000.000		
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Keamanan Perdagangan Konsumen		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				0 Laporan		600.000.000	PENDAPATAN ASU DMEPAH (PAD)	
3 30 07 1.02	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								874.000.000		
3 30 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri								874.000.000		
3 30 07 1.02 01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihubungkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Ritel, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				0 UMKM		874.000.000	PENDAPATAN ASU DMEPAH (PAD)	
3 30 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								50.000.000		
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				0 Dokumen		50.000.000	PENDAPATAN ASU DMEPAH (PAD)	
TOTAL									21.771.000.354		
									20.953.500.000		

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan pelaksanaan Program/kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi total anggaran Rp. 14.061.860.806 yang terdiri atas :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Aset Tak Berwujud
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan total anggaran Rp. 800.000.000 yang terdiri atas :

Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor



1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

III. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan total anggaran Rp. 500.000.000 yang terdiri atas

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
2. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

IV. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan total anggaran Rp. 1.167.000.000 yang terdiri atas

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

V. Program Pengembangan Ekspor dengan total anggaran Rp. 1.694.000.000 yang terdiri atas :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

1. Pameran Dagang Internasional/Nasional
2. Pameran Dagang Lokal
3. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
4. Peningkatan Citra Produk Ekspor
5. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

VI. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan total anggaran Rp. 2.874.000.000 yang terdiri atas

Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Layanan Pengujian
2. Pengembangan Layanan Sertifikasi
3. Pengembangan Layanan Kalibrasi

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

VII. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan total anggaran Rp. 674.139.948,- yang terdiri atas

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. "Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan Penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan mulai dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang dan tingkat forum perangkat daerah gabungan. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan dijabarkan kembali pada Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Makassar,

2023

**Kepala Dinas Perdagangan
Prov.Sulawesi Selatan**

Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19690714 199112 1 001